



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. YULI ARSIANTO, MM.

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Daerah

Drs. YULI ARSIANTO, MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680702 199803 1 004

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	100%
2	Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %
3	Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 628.552.000	APBD
2. Program Perlindungan Perempuan	Rp 136.040.000	APBD & DAK-N
3. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 136.040.000	APBD & DAK-N

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah



Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Drs. YULI ARSIANTO, MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680702 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHA SETYASIH, M.Psi

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. YULI ARSIANTO, MM

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak

Drs. YULI ARSIANTO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680702 199803 1 004

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

RIDHA SETYASIH, M.Psi  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19830110 201502 2 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1.	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA	1 dokumen
2.	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA	90%
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA	90%
4.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA	3 unit
5.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA	1 laporan
6.	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	1 unit

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA	
7.	Terlayannya korban kekerasan perempuan yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%
8.	erlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>			
1.	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang
2.	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
3.	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
4.	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan	2 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
5.	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 orang
6.	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 orang
7.	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
8.	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 orang
10.	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
11.	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang
12.	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
13.	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat	7 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
14.	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
15.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen
16.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
17.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
18.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
19.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
20.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket
21.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 laporan

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
22.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
23.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit
24.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
25.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit
26.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 6.570.000 Rp 40.200.000	APBD APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 22.248.000	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.500.000	APBD

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1.	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA	1 dokumen
2.	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA	90%
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA	90%
4.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA	3 unit
5.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA	1 laporan
6.	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	1 unit

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA	
7.	Terlayannya korban kekerasan perempuan yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%
8.	erlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>			
1.	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang
2.	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
3.	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
4.	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan	2 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
5.	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 orang
6.	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 orang
7.	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
8.	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 orang
10.	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
11.	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang
12.	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
13.	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat	7 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
14.	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
15.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen
16.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
17.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
18.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
19.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
20.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket
21.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 laporan

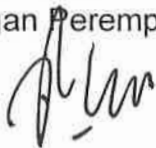
No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
22.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
23.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit
24.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
25.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit
26.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 6.570.000 Rp 40.200.000	APBD APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 22.248.000	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.500.000	APBD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	520.925.000	APBD
	Rp	36.109.000	APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	136.040.000	APBD & DAK NF
7. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	136.040.000	APBD & DAK NF
8. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak



Drs. YULI ARSIANTO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730120 199803 2 004

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Unit Pelaksana Teknis Daerah



RIDHA SETYASIH, M.Psi  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19830110 201502 2 001